

## EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL TERHADAP UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN NGANJUK

Nayla Ratu Meihani<sup>1</sup>, Risyah Huwaida Maharani<sup>2</sup>, Indah Prabawati<sup>3</sup>, Firre An  
Suprpto<sup>4</sup>

[25040674272@mhs.unesa.ac.id](mailto:25040674272@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [25040674274@mhs.unesa.ac.id](mailto:25040674274@mhs.unesa.ac.id)<sup>2</sup>,  
[indahprabawati@unesa.ac.id](mailto:indahprabawati@unesa.ac.id)<sup>3</sup>, [firresuprpto@unesa.ac.id](mailto:firresuprpto@unesa.ac.id)<sup>4</sup>

Universitas Negeri Surabaya

### ABSTRAK

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan, dinamika ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kerentanan kelompok berpenghasilan rendah. Akan tetapi, hal ini masih menjadi salah satu masalah sosial-ekonomi utama di Indonesia yang berdampak luas terhadap kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan pembangunan nasional. Dalam situasi tersebut, program bantuan sosial berfungsi sebagai alat kebijakan fiskal untuk melindungi kelompok rentan dan meningkatkan kemampuan masyarakat miskin. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab bantuan sosial yang belum tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga perlu adanya evaluasi efektivitas program bantuan sosial dalam menurunkan angka kemiskinan. Diharapkan bahwa analisis ini akan membantu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan untuk menangani kemiskinan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yakni melalui studi pustaka atau biasa juga disebut dengan studi literatur. Sumber informasi atau bahan materi yang diperoleh berasal dari pencarian data-data dari berbagai sumber yang relevan seperti artikel, jurnal, e-book, maupun media lainnya. Selain itu, pengambilan judul dari penelitian ini berdasarkan program pemerintah di Indonesia yang berlangsung sejak 2005.

**Kata Kunci:** Bantuan Sosial, Kemiskinan, Ketepatan Sasaran.

### ABSTRACT

*The government has undertaken various efforts to reduce poverty rates, economic dynamics, income inequality, and the vulnerability of low-income groups. However, this remains one of the main socio-economic problems in Indonesia, with widespread impacts on the quality of life of the population and the sustainability of national development. In such a situation, social assistance programs serve as a fiscal policy tool to protect vulnerable groups and enhance the capabilities of poor communities. Nevertheless, some social assistance programs are still not properly targeted. The purpose of this, is to edintify the factors causing social assistance to not reach those in need. Therefore, an evaluation of the effectiveness of social assistance programs in reducing poverty rates in necessary. It hoped that this analysis will help generate more targeted and sustainable polivy recommendations to addres poverty in Indonesia. The research method used is through literature study, also known as the literature method. The resources of information or materials obtained come from searching data from various relevant sources such as articles, journals, e-books, and other media. In addition, the title of this study is based on a government program in Indonesia that has been running since 2006.*

**Keywords:** Social Assistance, Poverty, Proper Targeting.

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih menghadapi kemiskinan. No Poverty (Tanpa Kemiskinan) adalah agenda global Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem dalam segala bentuk, di mana pun, pada tahun 2030. Hal ini berfokus pada pemberdayaan kelompok rentan, memastikan akses

setara terhadap layanan dasar, sumber daya ekonomi, serta perlindungan sosial bagi mereka yang berpenghasilan di bawah rata-rata. Program pemerintah yang sering kita kenal dengan bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT/Kartu Sembako), dan Kartu Prakerja, merupakan komponen utama dari perlindungan sosial yang dirancang untuk mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuknya. Namun, program ini belum berjalan maksimal seperti yang kita pikirkan. Menurut Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul berdomisili Nganjuk, Jawa Timur, mengungkapkan bahwa sebanyak 45 persen bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran (Asatunews, 2026). Salah satu pernyataan dari daerah yang ada di Indonesia membuktikan bahwasanya kemiskinan belum bisa ditekan sepenuhnya. Selain bantuan yang tidak tepat sasaran, ternyata ada kelompok yang disebut sebagai "the invisible people" atau masyarakat yang berhak menerima bantuan, namun belum terdata. Situasi ini akan terus mendesak pemerintah untuk turun tangan mengatasi program bansos yang tidak tepat sasaran karena hal ini bisa membentuk maladministrasi yang berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar, menghambat pengentasan kemiskinan, dan menimbulkan ketidakadilan sosial.

Penelitian ini menyelidiki sejumlah masalah penting yang berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan sosial di Kabupaten Nganjuk. Pertama, penelitian ini melihat bagaimana proses pendataan dan verifikasi penerima program bansos dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk, serta faktor-faktor yang menyebabkan program bansos tidak mencapai sasarannya. Kedua, penelitian ini juga mengkaji bagaimana ketidaktepatan sasaran program bansos berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat hingga menganalisis bagaimana masyarakat terlalu bergantung pada program tersebut. Tujuan dari penelitian ini, untuk menganalisis proses pendataan dan verifikasi penerima bansos di Kabupaten Nganjuk, serta untuk menemukan faktor-faktor yang menyebabkan bantuan sosial tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak ketidaktepatan sasaran program bansos terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Kabupaten Nganjuk serta merumuskan strategi perbaikan guna meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan oleh pemerintah daerah.

## **METODOLOGI**

Studi literatur adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta laporan penelitian terdahulu yang relevan yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk membangun landasan teori, menemukan kesenjangan penelitian, dan memahami topik secara mendalam tanpa riset lapangan. Alasan penggunaan metode penelitian ini, melalui pendekatan tersebut, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, kebijakan, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan distribusi bantuan sosial dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Selain itu, pemilihan metode studi literatur juga dipertimbangkan karena adanya keterbatasan dalam melakukan penelitian lapangan secara langsung, seperti kendala kendaraan, keterbatasan waktu, serta jarak dan lokasi penelitian yang cukup jauh. Oleh karena itu, studi literatur menjadi alternatif yang efektif untuk tetap memperoleh data dan informasi yang relevan guna menganalisis permasalahan yang diteliti secara sistematis dan mendalam. Tidak hanya itu, fenomena yang ingin dikaji juga sudah berjalan cukup lama. Sehingga, hanya perlu dikaji ulang dengan teliti dan memberikan solusi baru yang lebih

relevan lalu bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nganjuk, jumlah penduduk miskin (kurang mampu) pada Maret 2025 menunjukkan 107,30 ribu jiwa. Berikut tabel perbandingan profil kemiskinan di Kabupaten Nganjuk tahun 2024-2025:

Tabel Data Penduduk Miskin Kabupaten Nganjuk

No	Aspek	Tahun 2024 (Maret)	Tahun 2025 (Maret)	Perbandingan/Perubahan
1	Jumlah Penduduk Miskin	108,37 ribu jiwa	107,30 ribu jiwa	Turun sekitar 1,07 ribu jiwa
2	Persentase Kemiskinan	10,17%	10,06%	Turun 0,11%
3	Total penduduk	1,16 juta jiwa	1,17 juta jiwa	Naik tipis (pertumbuhan penduduk)

Melalui data tersebut, dapat diketahui bahwasanya terdapat tren penurunan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk meskipun relatif kecil. Dengan begitu program penanggulangan kemiskinan mulai menunjukkan perubahan yang cukup baik. Namun, di lain sisi juga diperlukannya penguatan agar penurunannya lebih signifikan dan tetap stabil. Meskipun tampaknya Kabupaten Nganjuk mengalami penurunan kemiskinan, perlu diketahui lebih dalam lagi apakah program bansos yang diberikan oleh pemerintah sudah sepenuhnya terlaksana dengan baik di kabupaten tersebut.

### 1. Proses Pendataan dan Verifikasi Penerima Program Bantuan Sosial

Proses pemberian bantuan sosial pun di Kabupaten Nganjuk dilakukan secara terpadu oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melalui verifikasi lapangan, seperti survei Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) untuk rumah layak huni, dan penyerahan simbolis oleh Bupati/Pemprov Jatim yang biasanya dilaksanakan di Pendopo Kabupaten.. Dikatakan, bantuan sosial tersebut rutin diberikan kepada lansia miskin, siswa kurang mampu, dan penanganan kemiskinan ekstrem melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun APBD Provinsi. Akan tetapi, masih ada saja isu nasional terkait program tersebut yang masih menjadi evaluasi untuk pemerintah setempat terutama dalam konteks penonaktifan jutaan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinilai tidak tepat sasaran. Dengan adanya isu tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk bertindak dalam memberikan kebijakan baru sejak bulan Februari (KabarBaik, 2026). Tentunya kebijakan tersebut bertujuan untuk memperketat penentuan penerima bantuan sosial dan PBI jaminan kesehatan agar lebih tepat sasaran, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan. Penentuan penerima bantuan di Nganjuk, kini beracu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, program tersebut dibagikan berdasarkan sistem desil (tingkat kesejahteraan), yang artinya bantuan diprioritaskan untuk kelompok ekonomi terbawah. Pemkab Nganjuk juga turut menegaskan beberapa kondisi yang membuat masyarakat tidak berhak menerima bantuan sosial, seperti:

- Data yang tidak valid
- Sudah meninggal

- Bekerja sebagai ASN, TNI, Polri, atau aparaturnegara

Meskipun begitu, terkait dengan isu nasional mengenai masyarakat yang terlanjur dinonaktifkan (misalnya BPJS PBI), tetap dapat melakukan reaktivasi jika terbukti termasuk dalam golongan yang rentan, memiliki penyakit berat/kondisi darurat, atau data yang sudah diperbaharui dalam DTSEN dan sudah tervalidasi. Tidak hanya perubahan kebijakan, Pemkab juga akan melakukan verifikasi data langsung di lapangan, melakukan evaluasi data rutin setiap 3 bulan, hingga penerapan sistem pengaduan satu pintu dengan SOP maksimal 14 hari kerja yang tujuannya agar data semakin valid dan keluhan masyarakat dapat diatasi lebih baik.

## **2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penerima Bantuan Sosial Tidak Tepat Sasaran**

Berdasarkan berbagai laporan dan penelitian, termasuk temuan terbaru pada awal 2026, penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Nganjuk masih menghadapi masalah ketidaktepatan sasaran. Bahkan, Mensos Gus Ipul sempat menyebutkan adanya indikasi sebanyak 45% bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Nganjuk tidak tepat sasaran. Permasalahan ini disebutkan bukan kali pertama, melainkan akumulasi dari berbagai kendala teknis dan administratif yang menahun (Asatunews, 2026). Berikut adalah faktor-faktor utama penyebab penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran di Kabupaten Nganjuk:

- Ketidakakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS): Misalnya seperti ada warga yang sudah meninggal atau ekonominya sudah tergolong mampu, namun masih tercatat sebagai keluarga Penerima Manfaat (KPM) di DTKS. Perbedaan data antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tidak sinkron yang mengakibatkan warga miskin ekstrem terlewatkan, sementara warga yang mampu justru mendapatkan bantuan.
- Lemahnya Validasi dan Verifikasi di Tingkat Desa/Kelurahan: Kondisi yang mana pemerintah desa/kelurahan tidak rutin melaporkan perubahan status warga (misal: pindah, meninggal, atau sudah mampu) ke sistem SIKS-NG (Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation). Adanya potensi nepotisme yang mengutamakan kepentingan pribadi dari oknum perangkat desa dalam memasukkan data penerima bantuan juga menjadi salah satu faktor untuk isu tersebut.
- Masalah Administrasi dan Prosedur: Seperti manipulasi data pada laporan BPK yang menunjukkan adanya temuan NIK fiktif atau penggunaan nama orang yang sudah meninggal.
- Faktor Sosial dan Mentalitas: Adanya warga yang sebenarnya mampu, namun berusaha merebut hak warga miskin dengan mengaku tidak mampu atau memanipulasi data.

## **3. Bagaimana Dampak Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat atas Ketidaktepatan Sasaran Program Bantuan Sosial?**

Ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Nganjuk, yang bahkan disoroti oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, memiliki dampak signifikan terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat; Dampak utama dari masalah tersebut meliputi:

- **Dampak Sosial:**
  - a. Timbulnya konflik sosial: ketidakmerataan bantuan sering menimbulkan rasa cemburu sosial dan konflik di tingkat akar rumput (RT/RW/Desa) karena warga

- yang seharusnya layak menerima (kelompok rentan/miskin) justru tidak menerima bantuan, sementara yang mampu menerimanya.
- b. Ketidakpercayaan kepada Pemerintah: Buruknya tata kelola dan akurasi data menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pendamping desa dan pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan.
- c. Mentalitas Miskin: Bansos yang salah sasaran dapat memicu “mentalitas miskin” yang mana warga berupaya untuk tetap terdata miskin agar mendapatkan bantuan, sehingga dapat menghambat kemandirian ekonomi.
- **Dampak Ekonomi:**
  - a. Meningkatnya Kerentanan Warga Miskin: Warga yang seharusnya menjadi target utama (keluarga miskin) tidak menerima bantuan, sehingga beban ekonomi mereka semakin terpuruk.
  - b. Pemborosan Keuangan Daerah: Bansos yang salah sasaran, termasuk yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT), berakibat pada pemborosan anggaran daerah dikarenakan bantuan yang tidak tepat sasaran. Sehingga aliran dana tidak memiliki kejelasan yang tepat.
  - c. Ketidakefektifan Penurunan Kemiskinan: Anggaran besar yang diberikan menjadi tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, mengakibatkan lambatnya penurunan angka kemiskiskinan di Nganjuk.

#### 4. Dampak Masyarakat yang Bergantung pada Program Bantuan Sosial

Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Nganjuk, jika tidak dikelola dengan program pemberdayaan yang seimbang, dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, yakni:

- Penurunan Etos Kerja dan Motivasi: Ketergantungan bansos dapat mengurangi motivasi penerima manfaat untuk mencari pekerjaan sampingan atau berinovasi, karena merasa kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi
- Menghambat Kemandirian Finansial: Bantuan yang terus-menerus tanpa program pendampingan usaha dapat menunda perjalanan menuju kemandirian ekonomi keluarga, menyebabkan penerima tetap berada di dalam lingkaran kemiskinan.
- Kemiskinan yang Berkelanjutan: Meskipun bansos membantu menjaga daya beli jangka pendek, ketergantungan yang terlalu tinggi tanpa upaya graduasi (keluar dari penerimaan bantuan) akan membuat angka kemiskinan sulit turun secara signifikan dan berkelanjutan.
- Penyalahgunaan Bantuan: Terdapat kasus yang mana penerima bantuan sosial (PKH-BPNT) terlibat aktivitas negatif seperti judi *online*, yang menunjukkan belum efektifnya tujuan peningkatan kesejahteraan, sehingga memicu tindakan tegas seperti pencoretan dari daftar terima.

## KESIMPULAN

Program bantuan sosial merupakan salah satu instrument penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan, implementasi bantuan sosial masih belum sepenuhnya optimal. Permasalahan utama yang dihadapi ialah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan yang disebabkan oleh ketidakakuratan data, lemahnya proses verifikasi, serta adanya kendala administratif dan faktor sosial di masyarakat.

Ketidaktepatan sasaran tersebut menimbulkan berbagai dampak, baik secara sosial, maupun ekonomi. Dari sisi sosial, muncul konflik antar masyarakat dan menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Sementara dari sisi ekonomi, bantuan yang tidak tepat sasaran dapat menyebabkan pemborosan anggaran dan tidak efektifnya upaya penurunan kemiskinan. Selain itu, ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial juga menjadi tantangan tersendiri karena dapat menghambat kemandirian ekonomi dan memperpanjang siklus kemiskinan.

Oleh karena itu, diperlukannya upaya perbaikan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam pengelolaan program bantuan sosial. Perbaikan tersebut mencakup peningkatan kualitas data, penguatan sistem verifikasi, transparansi penyaluran, serta integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi. Melalui langkah-langkah tersebut, harapannya bantuan sosial tidak hanya mampu mengurangi beban masyarakat miskin dalam jangka pendek, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Dengan demikian, efektivitas bantuan sosial sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan kualitas implementasinya. Jika dikelola dengan baik, program tersebut dapat menjadi solusi strategis dalam mengatasi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abror, M. D., Chrysdian, A., & Marwanto, G. G. H. IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG BANTUAN SOSIAL TUNAI.
- Al-Ghifari, M. A. D., & Agustin, D. N. (2025). Kemiskinan yang Menguntungkan: Analisis Kritis Program BLT di Desa Sumengko Kabupaten Nganjuk. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(4), 969-980.
- Ardiansyah, R. N., & Tauran, S. IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BIDANG KESEHATAN DI DESA KALIANYAR KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK.
- Ardiyanto, A. F., & Prabawati, I. (2021). Implementasi program keluarga harapan (PKH) di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk (studi pada bidang pendidikan). *Publika*, 13-24.
- AZIZ, H. S. (2023). Implementasi Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Nganjuk (Doctoral dissertation, IPDN).
- Azizah, P. N., & Prathama, A. (2024). Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). *Journal Publicuho*, 7(2), 695-704.
- Fawa'id, M. W., & Utama, Y. Y. (2022). Analysis of Poverty Alleviation Through Family Hope Program (PKH) In Maqashid Sharia Perspective. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 8(2), 97-115.
- Harfianti, S. A. (2014). IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN DI DESA KENEP KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK. *Publika*, 2(1).
- Hutasoit, I., & Pribadi, A. S. (2023). Pelayanan Dokumen Paket Kematian Melalui Program Sedudo Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Konstituen*, 5(2), 106-124.
- Imron, A., Dini, C. Y., Pratama, S. A., Aziz, U. K., Mudiayah, S., Herowati, D., & Hartanti, F. I. (2022). SINERGI LINTAS SEKTOR DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN NGANJUK, JAWA TIMUR. *National Nutrition Journal/Media Gizi Indonesia*, 17.
- Laily, S. F. R. (2014). Pemberdayaan petani dalam meningkatkan ketahanan pangan (studi di Desa

- Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Merita, R., & Syalafiyah, N. (2023). Prinsip pengelolaan dana desa untuk kegiatan bantuan langsung tunai bagi keluarga miskin. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 8(01), 40-54.
- Merita, R., & Syalafiyah, N. (2023). Prinsip pengelolaan dana desa untuk kegiatan bantuan langsung tunai bagi keluarga miskin. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 8(01), 40-54.
- Mudawamah, M. (2022). Efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin ditinjau dari Distribusi Islam (Studi kasus di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk) (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- NURKHALIM, R. F. (2016). Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap Berat Badan Lahir Bayi di Kabupaten Nganjuk (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Purbowo, P., & Rahmadhani, I. P. D. (2025). Pengaruh Modal Sosial terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Bawang Merah di Kabupaten Nganjuk. *JIA (Jurnal Ilmiah Agribisnis): Jurnal Agribisnis dan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian*, 10(1), 40-49.
- Purnamasari, S. D., & Ma'ruf, M. F. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)(Studi Bumdes Mawar Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk). *Publika*, 8(5).
- Retpitasari, E., Salsabila, A., Faqih, M., & Prasetyo, H. B. (2024). Komunikasi Publik Pemerintah Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dalam Penyaluran Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai untuk Warga. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 5(1), 31-44.
- Saini, M. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Zakat Produktif (Studi Kritik Atas Tata Kelola Badan Amil Zakat Nasional [BAZNAS] Kabupaten Nganjuk). *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 14(2), 148-162.
- Setyawan, D. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. *Publika*, 5(4).
- WULANSARI, D. (2019). Analisis Efektivitas E-Warong KUBE Dalam Meningkatkan Kondisi Perekonomian Keluarga Penerima Manfaat (Studi Kasus Pada Program Keluarga Harapan Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk) (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).